

NO. 18, MEI 2006

ISSN 1410-5071

JURNAL PENELITIAN

Diterbitkan oleh LPPM Universitas Sanata Dharma

Model Struktur Molekul Geraniol Berdasarkan
Perhitungan Kimia Kuantum Semiempirik
Metode Terbaik dengan Spektrum Infra Merah
sebagai Pembanding
Enade Perdana Istyastono., St. Layli Prasojo

Penerapan Diagram Voronoi
pada Masalah Penentuan Wilayah Layanan Bisnis
D. Novita Handayani., M. Andy Rudhito

Pemilu 2004 di Mata Orang-orang Biasa
Christina S. Handayani., V. Didik Suryo Hartoko.,
C. Siswa Widyatmoko., dan Y.B. Cahya Widiyanto

Pemilu tahun 2004: Perjalanan Perempuan Sleman
dari Dapur ke Gedung DPRD
Lucia Juningsih

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat *Loan to Deposit Ratio (LDR)* Perbankan Nasional 2004-2005
Hg., Suseno T. W., L. Bambang Harmanto

LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA

NO. 18, MEI 2006

ISSN 1410-5071

JURNAL PENELITIAN

Diterbitkan oleh LPPM Universitas Sanata Dharma

DEWAN REDAKSI

Pelindung:

Dr. Ir. P. Wiryono Priyatamta, S.J.
Rektor Universitas Sanata Dharma

Penasihat:

Dr. Fr. Ninik Yudianti, M.Acc.
Pembantu Rektor I Universitas Sanata Dharma

Pemimpin Redaksi:

Dr. I. Praptomo Baryadi, M.Hum.
Ketua LPPM Universitas Sanata Dharma

Sekretaris Redaksi:

S.E. Peni Adji, S.S., M.Hum.
Kepala Pusat Penerbitan dan Bookshop Universitas Sanata Dharma

Anggota Redaksi:

Drs. H. Wahyudi, M.Si.
Drs. A. Tri Prianoro, M.F. Sc.
Dr. T. Priyo Widiyanto, M.Si..
Drs. A. Samana, M.Pd.
Dr. James J. Spillane, S.J.
R.B. Dwiseno Wihadi, ST. MT.
Drs. J. Eka Priyatma, M.Sc.
Drs. Silverio Raden Lilik Aji Sampurno, M.Hum.

Administrasi/Sirkulasi:

Agnes Sri Puji Wahyuni, Bsc.,
Maria Imaculata Rini Hendriningsih, S.E.,
Thomas A. Hermawan Martanto, Amd.

Alamat Redaksi:

LPPM SADHAR
Mrican, Tromol Pos 29, Yogyakarta 55002
Telepon: (0274) 513301, 515352, ext. 1527
Fax: (0274) 562383.
E-mail: lemlit@staff.usd.ac.id

Jurnal Penelitian yang memuat ringkasan laporan hasil penelitian ini diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sanata Dharma (LPPM USD), dua kali setahun: Mei dan November.

Redaksi menerima naskah ringkasan laporan hasil penelitian, baik yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa Inggris. Naskah harus ditulis sesuai dengan format di *Jurnal Penelitian* dan harus diterima oleh Redaksi paling lambat dua bulan sebelum terbit.

KATA PENGANTAR

Jurnal Penelitian nomor 18 ini menyajikan lima ringkasan hasil penelitian, baik hasil karya individu maupun kelompok, yaitu 1 laporan dari Program Studi Farmasi, 1 laporan dari Program Studi Pendidikan Matematika, 1 laporan dari Program Studi Psikologi, 1 laporan dari Program Studi Ilmu Sejarah, dan 1 laporan dari Program Studi Manajemen.

Kehadiran jurnal edisi ini ke hadapan sidang pembaca agak sedikit terlambat. Di tengah penyelesaian penerbitan jurnal edisi ini, pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2006, terjadi peristiwa yang sangat megejutkan, yaitu gempa bumi yang dahsyat dengan kekuatan 5.9 skala rechter. Gempa bumi tektonik yang terjadi kurang dari 1 menit itu telah mengubah suasana kehidupan penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah serta daerah sekitarnya. Bencana alam itu mengakibatkan banyak korban jiwa dan harta benda. Kita semua ikut merasakan duka yang mendalam seraya kita menggalang solidaritas untuk memberikan bantuan kepada para korban.

Perbaikan keadaan kehidupan para korban bencana gempa bumi memerlukan berbagai macam sumber daya dan berlangsung dalam waktu yang tidak sebentar. Hal ini memerlukan solidaritas dari semua kalangan masyarakat. Secara khusus kalangan akademisi dapat membantunya sesuai dengan kapasitasnya sebagai ilmuwan. Sesuai dengan bidang keilmuan yang digelutinya, kaum akademisi dapat menyumbangkan pemikiran-pemikirannya tentang bagaimana melakukan perbaikan kehidupan para korban bencana itu. Kaum akademisi juga dapat melakukan penelitian sehingga dengan penelitiannya itu dapat dihasilkan solusi alternatif

terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat yang menjadi korban bencana gempa bumi. Kita percaya bahwa masyarakat korban cepat bangkit membangun kembali kehidupannya. Sekian dan selamat membaca

Yogyakarta, Akhir Mei 2006

Redaksi

I. Praptomo Baryadi

(2)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Model Struktur Molekul Geraniol Berdasarkan Perhitungan Kimia Kuantum Semiempirik Metode Terbaik dengan Spektrum Infra Merah sebagai Pembanding	1 ~ 8
Enade Perdana Istyastono., St. Layli Prasojo	
Penerapan Diagram Voronoi pada Masalah Penentuan Wilayah Layanan Bisnis	9 ~ 17
D. Novi Handayani., M. Andy Rudhito	
Pemilu 2004 di Mata Orang-orang Biasa	19 ~ 57
Christina S. Handayani., V. Didik Suryo Hartoko., C. Siswa Widyatmoko., dan YB. Cahya Widiyanto	
Pemilu Tahun 2004: Perjalanan Perempuan Sleman dari Dapur ke Gedung DPRD	59 ~ 99
Lucia Juningsih	
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat <i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i> Perbankan Nasional 2004 - 2005	101 ~ 122
Hg. Suseno T.W., dan L. Bambang Harnoto	

PEMILU 2004 DI MATA ORANG-ORANG BIASA

***Christina S. Handayani., V. Didik Suryo Hartoko.,
C. Siswa Widyatmoko., dan YB. Cahya Widiyanto***

ABSTRAK

Penelitian ini mengungkap pemaknaan orang-orang biasa terhadap pemilu 2004. Data diambil di enam (6) desa yang termasuk wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Di masing-masing desa diambil satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan pemilih pemula. Pendekatan yang dipilih adalah pendekatan kualitatif dengan mengungkap kisah para informan tentang pemilu 2004 dengan metode wawancara. Kisah hidup yang diungkap bersifat reflektif sekaligus interpretatif. Pembawa cerita telah menciptakan makna dari hidup mereka – sedangkan pewawancara hanya membantu informan untuk membangun kisahnya. Mengungkap secara lisan pemaknaan, berarti mengangkat lapis-lapis persepsi yang menumpuk di dalam mentalitas manusia menjadi lebih disadari, sekaligus mengungkap pemaknaan lewat bahasa tidak hanya mengangkat lapis persepsi dari tumpukan medan mental yang dalam tetapi juga membangkitkan pemahaman sadar atas pengalaman. Melalui pembahasan ini situasi-situasi dinamai, persepsi-persepsi diangkat, dan dengan demikian menyadarkan seseorang terhadap hal-hal yang mungkin tidak disadari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilu dimaknai sekedar sebagai 'hajat' negara yang hanya mampir dalam kehidupan rakyat desa setiap lima (5) tahun sekali, yakni saat mereka menggunakan hak pilihnya. Sebagaimana sebuah penyelenggaraan 'hajat' di kampung, keterlibatan rakyat

biasa hanya akan terlihat sesaat sebelum dan pada saat hari H pemilihan, selebihnya mereka akan pulang dan kembali disibukkan dengan kehidupan sehari-hari. Kampanye pemilu pun dinilai sebagai sekedar karnavalnya anak muda, adanya tontonan gratis, media luapan emosi dan hura-hura. Kekuasaan negara tidak mampu menjangkau kehidupan rakyat desa, kebijakan yang dikeluarkan negara seringkali tidak mampu menyentuh kepentingan rakyat desa. Khusus tentang hasil pemilu, sebagian besar informan mengatakan bahwa hasil pemilu tidak memiliki relevansi apa-apa terhadap kehidupan mereka, kehidupan tidak berubah setelah pemilu. Pemilu cenderung dimaknai secara impersonal dan bersifat formal karena kehadiran pemilu juga tidak menyentuh rakyat biasa secara personal. Pemilu hadir sebagai agenda yang bersifat formal dan struktural, sebagai hajat negara yang tidak sekaligus menjadi 'hajat' rakyat biasa.

Selain itu, hasil penelitian ini juga mengungkapkan kebutuhan warga terhadap kehadiran negara sebagian besar masih mengacu pada kebutuhan material. Kecenderungan masyarakat untuk menilai pemerintahan dari segi nilai materialisme belaka dideterminasikan oleh penghidupan sehari-hari mereka yang terhitung "pas-pasan" dan ditambah lagi tingkat pendidikan yang rata-rata masih cukup rendah. Oleh karena itu, kecenderungan pilihan yang muncul kemudian berdasarkan faktor familiaritas, hubungan perkoncoan dan kekeluargaan, pengalaman masa lalu dan kesan-kesan baik yang ditampilkan partai (misalnya pemberian bantuan). Pemahaman masyarakat desa tentang sistem hubungan kekuasaan, sebagian besar masih terbalut oleh alam pikiran feodal kerajaan yang tersusun secara hirarkis dan penonjolan person dibanding sistem. Bagi mereka kekuasaan tersusun secara hirarkis: pusat lebih menonjol ketimbang daerah, pilihan pada tingkat propinsi maupun kabupaten tidak ada artinya, karena kekuasaan berlangsung di pusat dan merembes ke daerah. Rakyat desa tidak menyadari bahwa sebagian besar pengaturan sosial yang akan menimpa mereka bergantung pada kebijaksanaan di tingkat daerah. Cara berpikir semacam ini membuat pembacaan tentang ideologi partai maupun program-programnya tidak berarti.

Hasil penelitian ini menyarankan agar negara atau partai politik yang secara khusus mendapat tugas penyadaran politik bagi masyarakat pemilih melakukan sosialisasi dengan media

PEMILU 2004 DI MATA ORANG-ORANG BIASA

yang lebih melibatkan partisipasi langsung dari masyarakat pemilih (bersifat personal). Sosialisasi melalui media massa (cetak atau pun elektronik) tidak cukup efektif bagi rakyat di pedesaan. Bagi rakyat pedesaan, negara harus mampu hadir dalam wujud-wujud yang konkret.

Kata kunci : makna, persepsi, dan pemilu

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rakyat biasa hampir tidak pernah dilibatkan dalam membahas dan menentukan agenda-agenda besar negara termasuk pemilu. Suara mereka jarang sekali didengar, dan keberadaan mereka jarang sekali diperhitungkan. Kalaupun suara rakyat diperhitungkan tampaknya lebih untuk kepentingan yang berkuasa daripada untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan ‘rakyat biasa’ atau ‘rakyat kebanyakan’ adalah orang-orang yang tidak memiliki akses terhadap kekuasaan, artinya bukan orang-orang yang terlibat (secara aktif dan sadar) dalam pengambilan kebijakan-kebijakan negara, warga negara biasa yang tinggal di desa sebagai orang desa yang biasanya berpendidikan rendah dan akses informasinya terbatas.

Sejak pemilu pertama tahun 1966 digelar hingga pemilu tahun 1999, Indonesia telah mengalami sebanyak delapan kali (8x) pemilu. Namun dari delapan kali pemilu tersebut, hanya pemilu pertamalah (tahun 1966) yang dinilai banyak ahli sebagai pemilu yang paling demokratis dengan partai peserta pemilu terbanyak dan rakyat memilih secara langsung. Selebihnya, terutama pada jaman orde baru pemilu hanyalah ritual setiap lima tahun sekali yang selalu menghasilkan Golkar sebagai partai pemenang pemilu dan Soeharto sebagai presidennya. Baru setelah kekuasaan Orde Baru runtuh pada tahun 1998, geliat demokrasi yang dipenuhi dengan euforia reformasi mulai dirasakan sebagai angin baru bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Namun, kinerja pemenang pemilu pertama di era reformasi, tahun 1999, dinilai masih banyak diwarnai taktik-taktik lama (warisan orde baru) dengan wajah

yang baru, seperti masih kuatnya jaringan nepotisme, praktik-praktik korupsi dan lain sebagainya. Banyak pihak kemudian menilai, pemenang pemilu tahun 1999 telah meninggalkan massa pemilih yang paling besar sumbangannya terhadap kemenangannya, yakni pemilih dari rakyat kebanyakan.

Dengan terpinggirkannya kepentingan rakyat kebanyakan dari agenda-agenda negara, hampir dalam setiap era pemerintahan negara, maka perlu ada sebuah upaya untuk mengartikulasikan suara-suara mereka. Pemilu tahun 2004 merupakan momen yang tepat untuk menggali suara-suara mereka yang sering terbungkam. Dalam hal ini, perlu ada sebuah studi yang memiliki kepedulian terhadap rakyat biasa dan cenderung memusat pada mereka yang tidak bersuara. Fokusnya justru pada kelompok-kelompok yang tidak mempunyai akses ke para sejarawan profesional yang selama ini telah mencatat perjalanan sejarah bangsa ini. Suara-suara rakyat kebanyakan sangat jarang muncul dalam buku-buku sejarah yang ditulis oleh para sejarawan profesional.

Oleh karena itu, studi ini terutama akan mengartikulasikan kesaksian mereka berkenaan dengan Pemilu 2004. Kesaksian adalah sebuah narasi, yang merupakan tampilan kehidupan dari berbagai individu yang hidup dan berfungsi dalam konteks budayanya sendiri (Huen, 2000). Studi ini dilakukan dengan sikap teliti pada hal-hal detil yang menyampaikan ‘realitas’ yang dialami masyarakat kebanyakan berkenaan dengan Pemilu 2004 dan membuat realitas itu dapat dipahami oleh orang-orang lain. Oleh karena itu, pendekatan yang dipilih adalah pendekatan pengalaman hidup yang menempatkan pengalaman kehidupan seseorang dalam konteks sosial dan sejarah tertentu (Huen, 2000).

Gunung Kidul dipilih sebagai tempat penelitian dengan alasan, karena dibandingkan dengan empat kabupaten lain di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul relatif merupakan daerah paling miskin dengan kondisi alam yang berbatu kapur sehingga sehingga gersang dan tidak subur. Wilayah Gunung Kidul tandus dan berkapur (Kompas, 7 Maret 2003). Hampir keseluruhan lahan pertanian yang luasnya 100.303 hektar berupa lahan kering. Banyak warga yang kemudian merantau ke daerah lain dengan menjadi buruh,

pembantu rumah tangga ataupun pedagang kaki lima di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, ataupun Yogyakarta. Selain itu, Gunung Kidul dikenal sebagai daerah penghasil *gaplek*, bahan makanan yang diolah dari singkong. Hanya jenis makanan inilah yang paling mungkin bisa dihasilkan tanah yang berbatu-batu, sedangkan tanaman padi sangat jarang bisa hidup. Namun, justru dengan kondisi alam yang demikian dihasilkan karakter penduduk yang mau bekerja keras.

1.2 Kerangka Konseptual

Keberadaan negara bangsa sebagaimana yang dipahami masyarakat sekarang sebenarnya bukanlah gejala yang sudah berlangsung lama. Pemahaman tentang nasionalisme baru dimulai pada abad ke-19 di Eropa. Pada masa sebelumnya pemahaman tentang negara bangsa, nasionalisme, kekuasaan dan terkait dengan hal itu adalah konsep tentang pengelolaan kekuasaan masih sangat lekat dengan pemikiran tradisional (Shiraishi, 1997).

Hampir bersamaan dengan periode tersebut terjadilah proses kolonisasi ke Timur, wilayah-wilayah Asia dan Afrika menjadi wilayah pendudukan negara-negara Eropa dan Amerika. Sebagai negara yang memiliki kepentingan eksploratif, negara-negara Eropa dan Amerika membawa pula perangkat sosial dan budaya untuk memudahkan kontak dengan rakyat jajahan. Dalam hal inilah maka konsep-konsep pengaturan negara dibawa dari pemikiran Barat ke wilayah Timur (Hobsbawm, 1992).

Masuknya konsep pengaturan rakyat secara baru di wilayah Asia dan Afrika mengakibatkan membawa patahan yang kian melebar antara pemikiran penguasa legal dengan rakyat, watak kekuasaan yang pada dasarnya sudah berjarak dengan massa rakyat menjadi semakin kencang dengan masuknya kerangka konseptual baru untuk mengatur masyarakat (Lombard, 1996). Dengan masuknya kerangka konseptual Barat untuk pengelolaan masyarakat kiblat pemikiran penguasa semakin dijauhkan dari geliat denyut hidup massa rakyat. Kebijakan-kebijakan yang diwacanakan, diambil, dilaksanakan dan didokumentasikan oleh negara (*state*) mengalami keterpatahan

dengan pengalaman, perasaan, atau harapan yang dimiliki masyarakat (Anderson, 1999).

Berdasarkan pemahaman di atas, pemahaman yang nyata atas kondisi rakyat tidak akan didapat jika pengkajian dilakukan terhadap kebijakan dan dokumentasi atas hal-hal yang dikerjakan oleh negara (*state*). Tidak hanya itu, pemahaman yang tepat atas kondisi rakyat juga tidak akan tercapai lewat pengkajian arsip atau dokumentasi tertulis karena kiblat pemikiran penulis yang dibentuk oleh dunia sekolah dan pemikiran modern sedikit banyak telah menggeser titik lensa terhadap hal-hal yang direkam.

Oleh karena itu, pemahaman yang lebih tepat akan didapat jika titik perhatian diarahkan pada pengungkapan pengalaman massa rakyat secara lisan, yaitu pada persepsi dan respon atas momen-momen historis tertentu. Lapis yang paling awal persepsi tersebut masih terkait dengan informasi yang berasal dari dunia luar namun sekaligus juga merupakan persepsi yang paling awam terhadap situasi. Mengungkap secara lisan persepsi tersebut akan mengangkat lapis-lapis persepsi yang menumpuk di dalam mentalitas manusia menjadi lebih disadari. Pada sisi lain, mengungkap persepsi lewat bahasa tidak hanya mengangkat lapis persepsi dari tumpukan medan mental yang dalam tetapi juga membangkitkan pemahaman sadar atas pengalaman, lewat pembahasaan situasi-situasi dinamai, persepsi-persepsi diangkat, dan dengan demikian menyadarkan seseorang terhadap hal-hal yang mungkin tidak disadari (Freud, 1920). Pada situasi seperti itu terdapat juga kemungkinan munculnya pemahaman sadar atas persepsi-persepsi yang lebih mendalam, yang dalam psikologi sering disebut sebagai *insight* (Abt dan Bellak, 1959).

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan studi ini adalah mengartikulasikan, memahami dan menjelaskan pengalaman yang dialami masyarakat kebanyakan (sebagai orang-orang biasa) berkenaan dengan pemilu 2004, dilihat dari tinjauan psikologis. Kajian ini akan menghasilkan deskripsi sekaligus analisis psikologis atas pengalaman hidup (kisah-kisah) dari enam (6) keluarga berkenaan dengan penyelenggaraan pemilu di negeri ini. Studi ini diharapkan juga

PEMILU 2004 DI MATA ORANG-ORANG BIASA

dapat menggambarkan relasi kekuasaan antar negara dan rakyat kebanyakan sekligus pemaknaan rakyat kebanyakan atas relasi tersebut.

1.4 Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan mengungkap kisah para informan tentang pemilu 2004 dengan metode wawancara. Kisah hidup yang diungkap bersifat reflektif sekligus interpretatif. Pembawa cerita telah menciptakan makna dari hidup mereka – sedangkan pewawancara hanya membantu informan untuk membangun kisahnya. Dalam hal ini apa yang dipilih untuk diingat oleh informan sangat dipengaruhi, kalau bukan ditentukan, oleh apa yang dipilih untuk diingat oleh keluarga dan anggota-anggota kelompok sosialnya. Wawancara dilakukan dengan cara terbuka (*open-ended*), dalam hal ini pertanyaan yang diajukan kepada informan adalah “ceritakan riwayat hidup anda tentang pemilu”. Hasil wawancara bukan sekedar cerita, tetapi juga suatu interpretasi dan suatu refleksi mengenai masa lampau. Pertanyaan umum penelitian ini adalah “Bagaimana keluarga atau anggota keluarga menempatkan pengalaman pemilu di dalam biografi/kisah kehidupan mereka ?”

Penelitian ini mengambil enam (6) desa di Kabupaten Gunung Kidul, sebut saja Desa A, Desa B, Desa C, Desa D, Desa E, dan Desa F. Di masing-masing desa diambil satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan pemilih pemula. Penelitian dilakukan dengan metode *live-in* (tinggal bersama) di keluarga yang dijadikan informan selama kurang lebih lima (5) hari, setelah sebelumnya beberapa kali melakukan pendekatan (*rappoport*). Metode *live-in* dipilih dengan pertimbangan, tujuan penelitian ini hendak mengungkap kisah pengalaman hidup informan yang hanya bisa dilakukan dengan mengamati langsung hidup keseharian mereka. Pemilihan waktu untuk *live-in* dibarengkan dengan waktu pemilu tahap pertama yakni pemilu caleg. Hal ini dimaksudkan agar peneliti bisa mengamati secara langsung bagaimana perilaku pemilih berkenaan dengan pemilu 2004. Untuk itu, tim peneliti dibagi dalam enam (6) kelompok yang terjun ke enam (6) desa, masing-masing kelompok terdiri dari dua (2) orang.

2. BIOGRAFI NEGARA DALAM PENGKISAHAN SEHARI-HARI

2.1 Gambaran Demografis

Dari keenam keluarga yang dipilih dapat disajikan data demografinya berikut ini:

Tabel. Demografi Informan

No		Desa A	Desa B	Desa C	Desa D	Desa E	Desa F
1	Pendidikan bapak	SMU	SMU	SMU	SD	-	-
2	Pekerjaan bapak	Wiraswasta, Usaha mebel	Lurah	Sopir	Pedagang (warung, wartel, togel)	Petani	Petani
3	Umur bapak	66 th	54 th	43 th	65 th	-	65 th
4	Pendidikan ibu	DII PGSD	SMA	SMA	SMP	-	-
5	Pekerjaan ibu	Guru SD, Penyewaan alat per kawinan	Ibu RT	Ibu RT	Pedagang warung, wartel, togel)	Pedagang (warung kecil)	Ibu RT
6	Umur ibu	44 th	49 th	41 th	50 th	-	55 th
7	Jumlah anak	3 anak	2 anak	4 anak	3 anak	5 anak	4 anak
8	Pendidikan anak	calon dokter, calon psikolog, SMU klas III	SMU klas II, SMP klas I	SD dan balita	Calon psikolog, SMU kelas III dan SMP kelas II	Pendidikan terakhir SD dan SMP	Pendidikan terakhir SD
9	Jumlah pemilih pemula	2 orang	1 orang	-	2 tp 1 org tdk memilih	-	1 org
10	Partisipasi pemilu	Peserta	Peserta No.4	Caleg	Peserta	Peserta	Peserta
11	Kondisi rumah	Permanen	permanen	Semi permanen	Permanen	Semi permanen	Semi permanen
12	Kriteria memilih	Ngemong rakyat, idola, kenal	Bantuan, kenal	Ketergan tungan ekonomi, kenal	Idola, kenal	Bantuan, kenal	Bantuan, kenal
13	Informasi pemilu	TV, Koran dan tabloid	TV dan Koran KR	Balai desa keterangan caleg (bos bapak)	TV, Koran Merapi	Perbincangan antar warga	Penjelasan balai desa dan mengamati gambar

PEMILU 2004 DI MATA ORANG-ORANG BIASA

14	Catatan	Korban 65	Birokrat (+ 20 th)	Fungsio- naris partai, hanya dipasang 'gadungan'	Ibu benda- hara partai tidak aktif	-	-
----	---------	--------------	-----------------------	---	--	---	---

Sebagian besar usia informan adalah usia orang tua, rata-rata di atas 40 tahun. Artinya sudah mengalami pemilu setidaknya 5-9 kali pemilu, ada tiga (3) informan yang mengalami pemilu sejak pemilu pertama kali yakni tahun 1955. Dari latar belakang pendidikan, yang tertinggi DII PGSD dan yang terendah ada yang sama sekali tidak mengenyam pendidikan. Pendidikan DII PGSD sebanyak satu (1) orang, SMA sebanyak lima (5) orang, pendidikan SMP sebanyak 1 (satu) orang, pendidikan SD sebanyak satu (1) orang dan sama sekali tidak mengenyam pendidikan sebanyak empat (4) orang. Dilihat dari latar belakang sosial-ekonomi, ada dua (2) keluarga yang sosial-ekonaminya cukup mapan yaitu keluarga A dan D, ada satu keluarga birokrat yaitu keluarga B (sebagai lurah), ada keluarga sopir seorang caleg nomor 1 Partai Merdeka (keluarga C), dan dua (2) keluarga petani (keluarga E dan F). Kriteria memilih paling banyak menyebutkan karena kenal dengan caleg dan kemudian juga karena bantuan yang diberikan. Sedangkan yang mengungkapkan karena memiliki idola dan kriteria pribadi hanya ada dua keluarga yakni keluarga A dan D, yang secara sosial-ekonomi cukup mapan dan pendidikan anak-anak cukup tinggi.

Mencermati data demografi di atas dapat dikatakan bahwa para informan masuk dalam ketegori 'orang biasa' yakni orang-orang yang tidak memiliki akses terhadap kekuasaan, yang artinya bukan orang-orang yang terlibat dalam pengambilan kebijakan-kebijakan negara, warga negara biasa yang tinggal di desa (orang desa yang berpendidikan rendah dan akses informasinya terbatas). Kalaupun beberapa informan ada yang berpendidikan cukup tinggi (setingkat DII) dan setingkat SMA, namun tampak sekali bahwa mereka tidak cukup memiliki akses informasi dan akses kekuasaan. Atau kalaupun ada informan yang menduduki posisi-posisi tertentu dalam masyarakat

misalnya sebagai lurah atau sebagai caleg, namun tetap tampak juga bahwa mereka hanyalah aktor-aktor yang ‘sendika dhawuh’ bukan aktor yang memanfaatkan akses kekuasaan yang dimilikinya.

2.2 Kisah Enam Keluarga Desa tentang Pemilu

Kisah 1: Kisah Keluarga A

Keluarga A termasuk keluarga yang *melek* politik, berpendidikan dan berwawasan luas. Hal ini dapat dipahami juga dari latar belakang keluarga, sebagai korban politik tahun 1965 tampaknya persoalan politik bagi keluarga ini menjadi tema yang peka sekaligus selalu disikapi dengan sikap waspada dan kritis (catatan: informan sama sekali tidak mau menyebut dirinya sebagai korban peristiwa G-30 S/ PKI sementara yang dimaksud sebagai korban ‘65 adalah korban peristiwa G-30 S/PKI). Diskusi persoalan politik sering dilakukan antar anggota keluarga, ayah-ibu dan anak-anak (ada dua (2) pemilih pemula). Media informasi yang dimiliki adalah Koran dan TV. Jual beli suara tidak berlaku dalam keluarga ini karena mereka memiliki pilihan sendiri, pernah ada tawaran untuk disekolahkan ke jenjang S1 bagi ibu asalkan ibu mau memilihnya sebagai caleg tetapi tawaran tersebut ditolak. Ibu menyebut diri sebagai wong cilik seperti *cethol* (ikan yang sangat kecil) yang dengan pejabat merasa jauh jaraknya. Di samping itu, ia merasa sebagai warga bandel, *mbeling* tidak terlalu memperhatikan sistem pemilu kali ini, sehingga pas hari H nya kebingungan. Meskipun kriteria yang dipilih sudah ditentukan sebelumnya namun saat pencoblosan akhirnya calon yang dicoblos kriterianya tidak sesuai dengan yang direncanakan karena tidak ada yang kenal (yang kemudian dipilih oleh ibu adalah ‘mantan pacar’ yang mencalonkan diri di tingkat kodya, ini di luar rencana). Bapak mengaku tidak cukup percaya dengan caleg-caleg tersebut berhasil di urutan atas bukan karena perjuangannya dari bawah tetapi karena uangnya. Jadi hanya orang-orang kaya yang bisa mencalonkan diri. Di samping itu, karena saat pencalonan seringkali sudah mengeluarkan uang banyak maka dikhawatirkan saat sudah terpilih justru memikirkan bagaimana ‘pengembalian’ (modal) dapat dipenuhi, akhirnya tidak akan berpikir untuk kepentingan rakyat yang memilihnya. Dengan pertimbangan tersebut baik bapak maupun ibu menganggap pemilu sebagai hal yang biasa, rutinitas setiap lima tahun sekali, tidak akan merubah kehidupan mereka.

PEMILU 2004 DI MATA ORANG-ORANG BIASA

Bagi ibu, pemilu menyebabkan gaji ke-13 sebagai guru tertunda pemberiannya karena dananya dipakai untuk dana pemilu oleh negara. Di samping itu, harga-harga seperti biaya angkutan umum naik, demikian juga harga beras, minyak dan lain-lain. Namun, bagi warga yang ekonominya lemah menurut ibu dengan adanya kampanye justru secara ekonomi ‘terobati’ karena mendapatkan tambahan penghasilan dari uang yang diberikan partai-partai peserta pemilu. Dalam setiap kampanye warga yang ikut selalu diberi uang.

Kisah 2: Kisah Keluarga B

Keluarga B merupakan keluarga birokrat karena posisi bapak sebagai lurah (kurang lebih 20 tahun, sejak tahun 1984-an). Bapak cukup kecewa dengan pemenang pemilu 1999 (PDIP) yang telah mengingkari janji-janjinya kepada rakyat yang memilihnya, maka dia menyebutnya partai ini tidak profesional. Berbagai janji yang tidak dipenuhi antara lain biaya sekolah yang justru semakin mahal, kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak, gula dan lain-lain juga semakin mahal. Selain itu, dia berpendapat bahwa ada kemungkinan para caleg melakukan tindakan saling ‘membunuh’ atau menjatuhkan temannya untuk mendapatkan posisi teratas. Dari penuturan anaknya yang menjadi pemilih pemula (ada 1 pemilih pemula), bapak menyarankan untuk memilih calon yang memang sudah membantu mereka misalnya membangun mesjid, memberi semen dan lain-lain. Orang yang sudah memberikan kebaikan harus dibalas kebaikan yakni dengan memilihnya. Selain itu, kriteria untuk menentukan pilihan juga didasarkan atas kenal atau tidak dengan caleg yang akan dipilihnya. Oleh karena itu, ada kecenderungan untuk memilih caleg dari daerahnya. Bagi ibu, pemilu dianggap sebagai ‘barang negara’, jadi ibu tidak berani membicarakannya dengan anggota keluarga yang lain karena takut ‘salah’. Asalkan sudah nyoblos, sudah lega bagi ibu, mengenai hasil pemilu seperti apa tidak penting, pokoknya apapun hasilnya ikut saja. Bapak pun mengatakan bahwa ‘soal menang atau kalah tidak menjadi masalah’ yang penting masyarakatnya aman.

Mengenai keterlibatan dalam kampanye, menurut ibu lebih baik mencari pakan ternak (rumput) daripada ikut kampanye. Kampanye hanya akan mendapatkan rasa capek, lapar, sampai rumah marah-marah pada anak, istri atau ibunya. Prediksi bapak dengan 40% warganya yang buta buruf maka pelaksanaan pemilu caleg tidak bisa sah 100%, akan banyak yang gugur karena warga cenderung asal nyoblos, cenderung ngawur. Sistem ini selain menyulitkan warga

yang buta huruf juga akan menyulitkan warga yang berusia 50 tahun ke atas (tergolong lansia).

Kisah 3: Kisah Keluarga C

Keluarga C menjadi korban krisis moneter tahun 1998. Sebelum memutuskan pulang ke kampung di Wanasari, keluarga ini tinggal di Jakarta. Selama di Jakarta bapak bekerja di sebuah *mall* besar dan ibu memiliki usaha *catering*. Namun krisis moneter menyebabkan bapak kehilangan pekerjaan (kena PHK) dan usaha *catering* ibu porak poranda. Sejak tahun 2000 tinggal di kampung dan statusnya menumpang di rumah keluarga adiknya. Saat ini bapak menjadi sopir seorang tokoh yang menjadi caleg nomor 1 dari Partai Merdeka. Sebagai seorang kontraktor, tokoh ini memiliki usaha yang menyerap banyak tenaga kerja di daerahnya. Bahkan pada pemilu anggota legislatif, bapak tercatat sebagai caleg nomor 4 untuk daerah pemilihan I, wilayah Gunung Kidul. Adiknya (yang suaminya sudah meninggal) juga tercatat sebagai caleg nomor 4 untuk daerah pemilihan III di Gunung Kidul. Walaupun menjadi caleg, tetapi menurut penuturan mereka hanyalah caleg ‘gadungan’. Mereka menjadi caleg hanya untuk menambah daftar caleg. Hal ini berawal ketika bosnya mendatangi rumah mereka dan meminta mereka menjadi caleg dari partainya. Masalah dana akan ditanggung sepenuhnya oleh tokoh tersebut yang harus dilakukan mereka hanyalah ikut kampanye ke daerah lain. Demikianlah praktik semacam ini pun terjadi di daerah ini, bentuk praktek yang lain selain pemberian bantuan kepada warga.

Menurut penuturan bapak, warga di daerah ini sangat marah terhadap anggota DPR dari PDIP yang dinilai tidak berjalan untuk rakyat. Warga marah terutama berkenaan dengan bantuan pipa air. Bantuan yang sampai hanya pipanya sementara airnya tidak, demikian yang diungkapkannya, ‘Rakyat butuhnya air bukan pipa, memangnya pipa bisa diminum?’ Pada musim kemarau bantuan ini sangat penting mengingat masalah air di Kabupaten Gunung Kidul selalu menjadi persoalan besar. Oleh karena itu, lebih lanjut dikatakan bahwa dalam pemilu kali ini caleg dari PDIP disikat habis, tidak ada yang memilih sama sekali, “Caleg dari partai lainnya silahkan asal jangan partai itu!” Untuk keluarga ini, ibu mengungkapkan bahwa, “*Lha jelas milih ‘Pak Itu’* (bosnya suami), *lha umpamane ora apa njaluk dipecat?*” (Lha jelas milih ‘pak itu’, lha kalau tidak memilih dia apa minta dipecat?)

Hal lain yang menarik dari pengalaman keluarga ini adalah pemilu sekedar dianggap sebagai tema yang melekat dalam pekerjaannya

sebagai sopir caleg nomor 1 (satu). Demikian juga, kegiatan kampanye juga dilakukan hanya sekedar sebagai bagian dari pekerjaannya sebagai sopir caleg nomor 1. Saat pencoblosan menurut pengakuan mereka, setiap lembar surat suara yang harus dicoblos selalu gambar partai tersebut. Bagi keluarga dan juga warga sekitarnya yang sudah diberi pekerjaan oleh tokoh tersebut, sebuah wujud sopan santun di desa maka mereka harus membalas kebaikan tersebut dengan memberikan suaranya bagi tokoh tersebut. Sementara pemilu sendiri dianggap sebagai ‘urusana orang yang di atas’, yang penting baginya bisa terus menghidupi anak-anaknya dengan baik. Hasil pemilu ‘manut saja, kalau pun setelah pemilu harga barang-barang naik ‘ya manut’, tidak akan protes. Daripada protes menimbulkan masalah lebih baik ‘meneng’. Bagi bapak, apa yang didapat di jaman Orde Baru masih lebih baik daripada apa yang didapat di jaman reformasi, “Sejelek-jeleknya jaman Orba masih lebih jelek jaman reformasi, kalau tahunya begini ngapain dibikin reformasi?”

Kisah 4: Kisah Keluarga D

Keluarga D merupakan gambaran keluarga wiraswatawan yang sukses di desa. Keluarga ini memiliki tiga jenis usaha yakni warung makan (khusus daging), wartel dan togel. Sebelumnya pernah beternak ayam dan memiliki kebun yang ditanami pohon jati. Usaha ternak berhenti sebelum masuknya flu burung, alasannya karena dana pengeluaran untuk ternak semakin besar. Sedangkan pohon-pohon jatinya dipergunakan untuk menyempurnakan bangunan rumah. Sekitar tahun 1980-an ibu juga pernah membuka toko kelontong dan tanaman palawija, tapi kemudian beralih dengan ketiga usaha tersebut hingga saat ini. Bagi keluarga ini, sebagaimana yang diungkapkan ayah-ibu dan pemilih pemula, pemilu sekedar rutinitas lima (5) tahunan yang dilaksanakan hanya untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara. Mengenai hasil pemilu, “siapa yang akan terpilih masa bodoh lah, tidak terlalu ambil pusing.” Apalagi setelah kasusnya Amien Rais (catatan: informan menyebut ini untuk menunjuk peristiwa perubahan era orde baru ke era reformasi dimana Amin Rais sebagai salah satu simbol reformasi), yang menurut penuturan ibu menjadi penyebab sulitnya kondisi saat ini, “apa-apa mahal, apa-apa sulit, gara-gara reformasi semuanya malah jadi susah”. Bahkan saking bencinya dengan Amin Rais, setiap kali ada tokoh ini muncul di TV oleh ibu televisinya langsung dimatikan. Ibu sendiri merasa lebih enak pada masa Pak Harto, meskipun pada masa itu

partainya masih banyak (sekitar 19) tapi hanya mencoblos gambar, kalau sekarang selain partainya banyak juga masih harus untuk mencoblos orangnya juga. Ibu juga lebih senang masa dulu, karena barang-barang murah, tidak ada kekacauan. Cuma jeleknya jaman Orde Baru kalau ada yang nantang, akan "dikucilkan", tapi selain itu ibu lebih menyukai masa dulu daripada masa sekarang.

Bapak dan ibu tidak merasa kesulitan dengan sistem pemilu kali ini. Caleg yang dipilih di tingkat kabupaten adalah teman-teman yang semuanya sudah kenal. Menurut kami, orang kecil ini meskipun kami sudah memilih, tapi kalau yang di atas tidak setuju (ada pro dan kontra) ya ramai lagi. Yang terpenting menurut bapak justru wakil di pusat tetapi sayangnya justru caleg-calegnya tidak mereka kenal, "untuk yang pusat itu lo jangan sampe salah. Intinya kan pusat, tapi yang pusat kan malah orang-orangnya tidak kenal". Bagi pemilih pemula kampanye hanya ajang mencari uang untuk pemuda-pemudanya, karena ketika kampanye dibayar sekitar 10 ribu/orang sekaligus sebagai uang bensin, bensin harus penuh sebelum berangkat. Dalam keluarga ini ada dua (2) pemilih pemula tetapi salah satu diantaranya tidak memanfaatkan hak pilihnya. Kebanyakan kampanye bagi pemilih pemula ini tidak menyenangkan. Pernah ada yang membawa senjata tajam saat kampanye. Suara bising kendaraan yang berkampanye mengganggu orang tidur, juga mengganggu belajar. Apalagi saat ujian di sekolah ada kampanye sehingga tidak konsentrasi. Selain itu, orang yang ikut seringkali mabuk, uang yang didapat sebelum kampanye dikumpulkan untuk beli minuman. Kalau ada kampanye warungnya langsung ditutup karena takut, mereka sering minta-minta, ambil barang dan tidak bayar, nanti warungnya dilempari. Pernah suatu ketika peserta kampanye mengambil bensin yang cukup banyak tapi tidak bayar. Oleh karena itu, jika sudah mendengar suara motor dari jauh, warung langsung ditutup. Untuk saat ini, mereka (peserta kampanye) tidak berani lagi menggedor-gedor pintu warung karena sudah ditunggui satgas. Ibu memiliki kenalan banyak satgas.

Kisah 5: Kisah Keluarga E

Keluarga E adalah gambaran keluarga besar, ada lima (5) keluarga yang tinggal dalam satu rumah yang berukuran 7m x 13m. Keluarga ini memiliki lima (5) anak yang semuanya sudah menikah, dan empat (4) diantaranya masih tinggal bersama orang tua. Penghasilan keluarga hanya dari pekerjaan sebagai petani dan warung kecil-kecilan di depan balai desa. Menurut penuturan bapak untuk mempersiapkan

PEMILU 2004 DI MATA ORANG-ORANG BIASA

pencoblosan di hari H pemilu caleg, bapak dan beberapa temannya dengan berboncengan sepeda motor pergi ke kantor kecamatan khusus untuk melihat gambar dan bendera partai. Dengan bergantian kaca mata karena penglihatan bapak-bapak ini sudah sangat berkurang, mereka mencermati gambar dan bendera partai satu per satu. Begitu pun setiap kali ada panggilan dari balai desa untuk sosialisasi pemilu, bapak selalu datang untuk mencermati sungguh-sungguh peragaan cara pencoblosan dan mendengarkan sungguh-sungguh penjelasannya. Dalam istilah bapak setiap kali dijelaskan dia akan mencermati '*njinggleng*' dan mendengarkan '*menyer-menyer*' (untuk mengatakan bahwa dia mencermati sungguh-sungguh dan mendengarkan sungguh-sungguh). Bapak juga mengatakan, bagi warga desa penjelasan langsung lebih dirasakan bermanfaat daripada penjelasan yang bisa disaksikan di televisi (mereka jarang mencermati sistem pemilu dari tayangan televisi). Antusiasme warga dalam menggunakan hak pilih juga tampak dari banyaknya warga perantauan (seperti dari Bandung, Jakarta atau pun Yogyakarta) yang pulang kampung saat pencoblosan.

Sebagai wong cilik, wong bodho, demikian bapak menyebut dirinya, setiap kali pamong memanggil hanya sendiko dhawuh (siap laksanakan), "*kula niku rumangsane wong cilik, wong bodho anger didawuh... sendika dhawuh... dibeluk... semaur, diprentah... mara, empun. Aja gawe masalah, mpun gampang*" (saya tahu diri sebagai orang kecil, orang bodho kalau diperintah ...siap laksanakan, dipanggil ...menyahut, diperintah datang, sudah. Jangan bikin masalah, sudah gampang). Baginya pemilu itu berarti '*negara lagi ewuh*' (negara sedang punya hajat). Bagi masyarakat kecil bantuan dari partai atau pun caleg sangat berarti, seperti bantuan berupa semen, atau material bangunan yang lain. Bagi bapak pemberian bantuan artinya diberi '*rasa*'. Artinya kemudian bantuan dianggap sebagai sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan, diberi '*rasa*' harus membala dengan '*rasa*' juga, yang wujudnya dengan memilih caleg dari partai yang memberi bantuan material.

Kisah 6: Kisah Keluarga F

Keluarga F adalah gambaran sebuah keluarga petani yang sederhana dengan pola kehidupan masyarakat pertanian yang komunal dan *guyub*. Pandangan hidupnya pun sangat sederhana, dalam bahasa Jawa dikenal sebagai *sak madya, sakcukupe*. Dengan kehidupan yang hanya mengandalkan penghasilan dari sepetak sawah/ladang seluas 500 m² yang menghasilkan setahun sekali ketela

20 karung, kacang tanah 4 karung, padi sebanyak 3 karung dan jagung sebanyak 2 karung, keluarga ini sudah merasa cukup. Sementara penghasilan tersebut dipakai untuk memenuhi kebutuhan keluarga, yang terdiri dari enam (6) orang, dalam setahun. Memang ada sedikit tambahan penghasilan yaitu dari hasil ternak, namun itu pun tidak seberapa karena keluarga ini hanya memiliki 1 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Bagi *wong cilik* (rakyat kecil), orang dusun seperti kami, hidup itu tidak perlu *neko-neko* (mengada-ada), demikian yang berkali-kali diungkapkan bapak. Sudah selayaknya orang kecil menyadari kodratnya (statusnya), *manut* (ikut saja) dengan *wong dhuwur* (pemerintah). Atau dalam istilah yang berkali-kali ibu katakan, kami ini hanya *wong bodho* (orang bodoh), rakyat jelata yang tidak perlu *neko-neko*.

Bapak merasa 'kapusan' (dibohongi) oleh pemenang pemilu 1999 karena janji-janjinya tidak menjadi kenyataan. Dalam masa kampanye pemilu 1999 mereka dijanjikan berbagai hal diantaranya harga-harga barang kebutuhan pokok yang stabil, uang sekolah yang terjangkau dan lain-lain. Namun kenyataannya masa setelah pemilu 1999 bagi mereka merupakan masa-masa yang sulit, harga-harga kebutuhan pokok naik, sampai bibit tanaman dan pakan ternak serta biaya sekolah semakin mahal. Bagi mereka kehidupan di jaman Orde Baru jauh lebih enak, harga-harga kebutuhan pokok stabil, sekolah masih murah, bibit tanaman dan bantuan berupa kambing pun benar-benar sampai kepada kami.

Sebagai orang kecil, merasa bingung mau menilai, kalau dulu kampanye itu tidak pernah ribut. Sekarang polisi yang mau melarai saja malah digebuki, sampai *nyonyor* jadi yang bener itu yang mana, bingung menilainya. Kalau dengan partai yang dulu itu (GOLKAR) mereka mengaku sudah hafal betul perilakunya, berbeda dengan partai-partai yang sekarang, "lha baru kampanye saja rusuhnya sudah bukan main, bagaimana nanti kalau terpilih", begitu yang dipikirkan orang kecil seperti kami ini. Pembangunan pun rasanya banyak yang dulu. Kalaupun dapat membedakan antara jaman dulu dan sekarang, tetap saja sebagai orang desa, tidak berani punya harapan atau pun keinginan macam-macam, kehidupan keluarga tentram itu sudah cukup, "Negara mau rusuh, atau ribut, bukan urusan kami". Paling banter kalau ternyata tidak ada perubahan setelah pemilu, "kami hanya berani berpikir, "ohh... pilihan kemaren itu ternyata salah lagi". Harapan orang kecil itu yang penting tentrem, tidak ada kerusuhan dan bagaimana caranya pemerintah bisa membuat bangsa

PEMILU 2004 DI MATA ORANG-ORANG BIASA

maju, jangan hanya disurvei saja tetapi setelah itu tidak diurus. Bagaimana negara ini mau diatur ikut saja, ada pemilu, disuruh nyoblos ya nyoblos. Yang penting menurut mereka, pamong yang di bawah, yang dekat dalam kehidupan mereka. "Kalau pemilu itu kan untuk negara, berbeda kalau nanti pemilihan lurah, ibaratnya kan sepertinya 'bapak' buat warga desa. Jadi bagi kami yang penting siapa pamong desanya, kalau pamong desanya mukti kami kan kalaupun cuma sedikit tetap ikut menikmati".

Ada pemilu atau pun tidak kehidupan kehidupan mereka tidak akan berubah, demikian yang dituturkan bapak. Siapa pun yang menjadi pemimpin yang di atas, tidak ada bedanya bagi mereka. Pemilu itu kewajiban, pokoknya yang penting sudah nyoblos, entah sudah bener atau belum. Karena caranya yang pemilu ini dirasakan sangat ruwet. Akhirnya karena kesulitan menurut mereka nyoblosnya menjadi sembarangan, ngawur pokoknya yang penting sudah *bleshek... bleshek* dicoblos satu-satu. Soalnya gambar yang banyak itu memang membuat pusing betul bagi mata mereka yang buta huruf. Kalau ada fotonya masih lumayan, masih bisa mengamati gambarnya.

Bedanya lagi, di zamannya Soeharto, zaman setelahnya Soekarno waktu kampanye pun orang tidak boleh omong-omongan satu sama lain. Apalagi membicarakan calon si A si B sama sekali tidak boleh, kamar pencoblosan pun kan seperti kamar tidur, tertutup. Dulu sebelum hari pencoblosan, orang-orang dikumpulkan, istilahnya *diguyub-ke*, dipesan besok nyoblos 'gambar ini'. Sebagai orang kecil, disuruh diam, tidak boleh omong-omongan ya ikut saja. Zaman dulu itu takut nanti menerima 'risiko' begitu orang sering bilang. Kalau sekarang orang bebas mau berbicara kapan saja, boleh. Meskipun tidak terpikirkan apa pun, mengapa ditutup-tutupi, rasanya memang takut sekali kalau orang sudah menyebut 'risiko' atau istilah di desa '*ketletuh*'. Seperti zamannya PKI dulu, didaftar partai ini.... partai itu, nyatanya malah amburadul, makanya mungkin di zaman Soeharto orang tidak boleh ngomong, nanti malah salah seperti jaman PKI dulu. Zaman sekarang kembali terbuka lagi, sebenarnya bagi rakyat kecil yang diinginkan hanya yang penting tentrem, boleh ngomong atau pun tidak itu tidak penting, asalkan tidak ada kerusuhan itu sudah cukup bagi kami. Dalam keluarga ini ada satu (1) pemilih pemula.

3. MIMPI TENTANG NEGARA DEMOKRASI

Apakah bangsa Indonesia berhak mengklaim telah menciptakan sebuah negara demokrasi? Mungkin pertanyaan ini tampaknya tidak lagi relevan untuk ditanyakan di saat ini, ketika Indonesia tak lagi berada di bawah tatanan yang menyebut diri sebagai orde baru. Orang dapat melihat dengan jelas bahwa beberapa bagian penopang sistem demokrasi telah berubah semenjak jatuhnya orde baru. Orang berhak mendirikan partai dan berhak memilih partai-partai yang ada tanpa tekanan. Namun perbaikan prosedur semata tidaklah dengan sendirinya menjadikan negara ini negara demokratis, karena ada bagian yang tampaknya tidak berubah, bahkan bagian yang paling mendasar: partisipasi rakyat biasa di dalam sistem demokrasi.

Rakyat biasa adalah orang kebanyakan yang tidak menjadikan kehidupan politik sebagai sandaran untuk hidup dan memperoleh makan. Mereka juga bukan orang yang menuliskan buah pikirannya di media massa untuk disebarluaskan. Politik hanya mampir di beranda rumah mereka lima tahun sekali, manakala umbul-umbul telah dipancangkan dengan bendera berwarna-warni, manakala jalanan telah disesaki oleh gambar lambang partai yang diusung dengan derum suara pekak sepeda motor. Kadangkala mereka membicarakan apa yang mereka lihat di televisi, di jalan atau pun yang mereka dengar dari tetangga kanan-kiri. Di situ terslip gerundelan mereka pada negara, serta sumpah serapah mereka pada ‘politik’ yang membuat ‘tebakaannya’ jadi lebih sulit. Realitas menjadi tak sederhana lagi. Gerundelan itu akan melenyap begitu saja, karena mereka harus tergesa pergi ke warung menyiapkan *dasarannya*, atau ‘*negal*’, ‘*ngalas*’ cari kayu atau rumput. Hanya pada saat-saat tertentu, seperti halnya ketika serombongan orang berbekal pertanyaan standar dan alat perekam mendatangi mereka, gerundelan mereka dapat ditata ulang dan dijelmakan menjadi semacam pernyataan atau boleh jadi manifesto, sebelum pada akhirnya akan kembali tersimpan rapat dalam teks-teks laporan penelitian. Dengan mendengarkan suara mereka, sembari pelan-pelan mengambil jarak dari apa yang dilukiskan orang di dalam opini-opini surat kabar, mungkin relevansi pertanyaan di atas dapat dipertimbangkan lagi.

3.1 Kampanye: Hura-hura, Pemborosan, dan Katarsis

Kampanye pemilu adalah karnavalnya anak-anak muda. Mereka mempertunjukkan kebisingan dengan menggeberkan suara sepeda motor mereka, berkeliling di jalanan dengan uang bensin yang dibayar oleh satgas parpol peserta pemilu. Uang bensin dan kaos partai adalah syarat mutlak. Tanpa keduanya karnaval jalanan tak kan bergerak. "Adikku mau kampanye nggak jadi karena duitnya nggak turun," kata seorang informan. Umumnya partai yang mampu membeayainya adalah partai-partai besar. Anak-anak muda itu bersalin kaos dan mengikuti karnaval dari berbagai partai tanpa suatu konflik yang berarti. Di sini tak ada lagi nilai kesetiaan. "Sehabis kampanye Golkar ... kampanye PDI, kampanye PAN ... ikut semuanya. ... asal ada yang kasih sepuluh ribu terus kaos partai," kata seorang bapak mengomentari kelakuan anak-anak muda. Perkelahian antar penggembira lebih jarang terjadi dibanding lima tahun lampau, "lebih tenang ... semua sandiwaraku itu ... tadi tukar kaos," imbuhnya.

Anak-anak muda itu memperoleh kesenangan sendiri, selain dapat uang saku. Mereka dapat mempertunjukkan kemudanya dengan, "menggembor-gemborkan motor", "muter-muter desa sambil teriak-teriak gitu," "...suka berhenti didepan gitu trus atraksi." Seorang penggembira yang turut serta berkeliling beralasan, "Asyik, karena anarkis, suaranya bising." Menjadi lebih menyenangkan karena banyak penonton yang menyorakinya. "Menjadi tontonan itu menyenangkan", imbuhnya. Pada saat semacam itu energi berlebih yang mereka miliki dapat mereka salurkan, bahkan dapat berlaku anarkis, dalam artian tidak perlu mematuhi aturan-aturan lalu lintas tanpa ada hukuman, bahkan mendapat hadiah, ditonton orang banyak. Mereka menjadi semacam penampil, *man of the show*, sebuah kesempatan yang jarang mereka miliki, berkuasa sejenak di jalan raya dan di kampung-kampung.

Kampanye juga berarti sebuah tontonan gratis. Magnet yang mengumpulkan penduduk kampung ke lapangan bukanlah jurkam yang berteriak-teriak menebarkan janji dan mengeber program. "Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri,"

tutur seorang penggembira, "toh belum tentu seperti gitu lho." Parpol peserta pemilu paham betul apa yang diinginkan massa, pertunjukan musik. "...bukan mau ikut kampanyenya, cuma karena ada campursari dan jathilan," kata seorang penonton. Politik bukanlah hal yang penting. Janji boleh diobralkan, tetapi di akhir perarakan harus ada musik yang mengalun.

Kampanye pemilu meski lebih beraroma hura-hura, tetap saja dianggap perlu. Sebagian besar penduduk mengetahui tentang partai-partai yang ada dari keramaian kampanye, umbul-umbul atau pun gambar-gambar lambang partai yang disebarluaskan. Si ibu yang lulusan DIII mencoba merasionalkan kegiatan kampanye dari sudut Parpol peserta pemilu, "jadi penjajakan itu kan perlu." Pengurus parpol di daerah dapat memperkirakan jumlah suara yang akan diraupnya dari berapa banyak peserta konvoi dan berjubelnya para penonton. Sedang dari sudut peserta yang bukan pengurus parpol, ia merasionalisasikan semangat peserta sebagai katarsis, "wong itu sebagai luapan emosionalnya dia kok, ... malah saya bisa mengetahui ... luapan dia..harapan...." Ia sendiri merasa perlu untuk melihat ke depan, melambaikan tangan untuk memberi semangat.

Meskipun demikian tak semua orang tersedot dalam arus hiruk-pikuk itu, "*mboten tumut, kemeng kula niku...uyag-uyug ger a entuk apa-apa. Lha mbok ngarit-ngarit wareg sapine*," tutur seorang petani. Bagi mereka kampanye itu pemborosan tenaga dan waktu. "Menurut saya mereka itu cuma hura-hura mbak," imbuhan si ibu yang bersuamikan seorang birokrat desa.

3.2 "...Negara iki arep Duwe Ewuh sing Jenenge Pemilihan UmumInggih Sendiko."

Pemilu adalah agenda penting. Semua informan usia orang tua (ayah, ibu atau nenek) memanfaatkan hak pilihnya, sementara ada satu dari empat informan pemilih pemula yang tidak memanfaatkan hak pilihnya (lihat keluarga D). Bahkan beberapa mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh, misalnya dengan mencermati gambar partai satu per satu, mempelajari cara pencoblosannya secara seksama dan lain-lain. Pemilu dianggap agenda besar negara, informan menyebutnya sebagai 'barang negara', atau *negara duwe ewuh sing kawujud*

PEMILU 2004 DI MATA ORANG-ORANG BIASA

pemilu (negara sedang punya hajat yang berupa pemilu). Kesungguhan mempelajari lambang partai melalui gambar dan bendera serta sebutan pemilu sebagai ‘barang negara’ mengekspresikan bagaimana informan menganggap pemilu sebagai hal penting untuk negara.

‘Ewuh’ yang dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan ‘punya hajat’, dalam pemaknaan warga Jawa di desa merupakan sebuah perhelatan yang seringkali mempunyai makna sangat penting karena biasanya dipakai untuk menyebutkan warga yang sedang menyelenggarakan upacara perkawinan atau pun peringatan kematian anggota keluarga. Dalam perhelatan besar yang disebut ‘ewuh’ ini biasanya para tetangga datang, bergotong royong untuk membantu tanpa diminta.

Ketika negara sedang ‘ewuh’ berupa pemilu, dengan ringan hati mereka membantu negara dengan menggunakan hak pilihnya. Ada seorang informan yang mengungkapkan bahwa setelah mencoblos merasa lega karena sudah bisa membantu negara. Dalam benak para informan tidak terbersit sedikit pun untuk tidak memanfaatkan hak pilihnya. Bahkan beberapa warga yang merantau ke daerah lain misalnya Bandung, Jakarta atau pun Yogyakarta pada hari pencoblosan mengkhususkan diri untuk pulang kampung menggunakan hak pilihnya. Sedemikian seriusnya, ada informan yang secara khusus datang secara rombongan (2-4 orang) ke kantor kecamatan hanya untuk mengamati gambar dan bendera partai. Bahkan karena mata tuanya mulai tidak bisa melihat jelas, satu kacamata dipakai secara bergantian.

3.3 Rumitnya sebuah Perhelatan Pemilu

Dalam pemilu 2004 banyak pemilih yang merasa kesulitan dengan sistem pemilu yang berlaku. Kesulitan banyak dialami terutama berkenaan dengan banyaknya gambar partai, banyaknya caleg yang harus dipilih dan penentuan pilihan untuk masing-masing tingkat terutama pilihan caleg untuk tingkat propinsi dan pusat (pada umumnya para pemilih tidak mengenal calon yang dipilihnya). Kesulitan semakin banyak dialami oleh warga desa yang buta huruf ataupun yang berumur 50 tahun ke atas karena mereka kesulitan mengidentifikasi caleg melalui nama dan fotonya. Kesulitan secara teknis juga banyak terjadi

karena ukuran bilik dinilai jauh lebih kecil dibandingkan besarnya kertas suara. Berikut ini penilaian beberapa informan:

“Untuk pemilu ini cara nyoblosnya kayaknya agak sulit, bingung nyoblosnya. Bisa tapi susah. Bingung pilih partai, partainya banyak, DPR-nya juga banyak. Caleg nya juga tidak pada kenal.”

“Mboten saget neliti sing niki namine sinten,...mboten reti. Dadose wau le nyoblos namung waton! Nggih namung waton lha sek sepindah niki, malah gambare kathah ngeten. Dadine nggih pripun nggih....buyer niku wau...ha...ha.. Nek sing pun apal ggih do ngertos...lha kulo dereng retos to...lha jenenge niki, tiyange sing pundi dereng ngerti. pokoke namung paitan ngawur.” “Anu lhe, nggih nyoblose dangu, marahi (sebabnya) pun sepuh-sepuh niku, ge’ marahi anu... teng andinge (sebelahnya) niku,.. ge’ sing mbukak’ e nika nggih suwe.”

Tetapi karena pemilu dianggap sebagai kewajiban, maka yang penting buat mereka adalah sudah menggunakan hak pilihnya, “yang penting sudah nyoblos, entah benar atau tidak”. Cara pencoblosan dinilai sangat ruwet, banyaknya gambar juga membuat kepala mereka pusing. Akibatnya mereka cenderung sembarangan, ngawur dalam menentukan pilihan, pokoknya yang penting sudah *bleshek...* *bleshek* dicoblos satu-satu.

Pemilu sekarang dinilai sangat berbeda dengan pemilu tahun 1999. Menurut salah satu informan bilik pada pemilu 1999 mirip kamar tidur, tertutup. Kertasnya lebih kecil, tempatnya luas jadi lebih mudah nyoblos dan melipatnya. Untuk pemilu 2004 semua serba buka-bukaan, terbuka, jadi bikin ‘*giduh*’, malu, “lha tempat pencoblosan yang sekarang itu lebih sempit, terbuka sementara kertasnya lebar sekali”. Bagi warga desa lebih senang yang tertutup, tidak malu karena dilihat orang banyak. Ada yang saking gugupnya tempat pencoblosannya itu sampai bergoyang....greg....greg...greg... .. Tata caranya dinilai sangat rumit dan sebagian besar warga desa belum tentu mengenal caleg untuk tingkat propinsi dan pusat. Sistem pemilu yang sekarang ini lebih menyulitkan, tidak seperti sistem yang dulu lebih mudah.

3.4 Tentang Parpol dan Para Calegnya

Para informan menuturkan kekecewaannya terhadap pemilu sebelumnya yaitu pemilu tahun 1999, mereka sangat kecewa dengan pemenang pemilu 1999, PDI-P, yang menurut mereka tidak memenuhi janjinya. Ungkapan perasaan dan penilaian yang kemudian muncul antara lain marah sekali, tidak suka, benci, merasa ‘*kapusan*’ (dibohongi) dan menilai tidak profesional; sampai ke dalam bentuk intensi tindakan bahwa dalam pemilu 2004 calon dari partai tersebut disikat habis, tidak ada yang memilih sama sekali. Mencermati ungkapan perasaan dan penilaian maupun intensi tindakan mereka tampak sekali bahwa rakyat kecil sama sekali tidak apatis dengan apa yang terjadi dengan negara ini. Berbagai persoalan tidak luput dari pengamatannya seperti tingkat kriminalitas, biaya hidup rakyat, biaya sekolah dan lain-lain yang semakin meningkat.

Penilaian para informan tentang daftar caleg yang lolos, dan tentang partai sampai anggota legislatif yang sudah duduk di kursi DPR bisa jadi sama kritisnya dengan penilaian kelompok menengah perkotaan. Penilaian mereka bukan saja didasarkan pada realitas lokalnya saja misalnya ‘proyek pipa’ yang tidak sampai, tetapi juga pengamatan tentang perilaku politik para caleg dan bagaimana proses mereka bisa lolos sebagai caleg. Beberapa istilah yang muncul dalam penilaian tersebut misalnya DPR *bambung*, tidak paham rakyat kecil, atau tidak bekerja untuk rakyat tetapi untuk kepentingan pribadi. Informan mencoba menjelaskan kecenderungan perilaku para elit politik tersebut dengan argumen berikut ini:

“Caleg-caleg sekarang ini sebenarnya menurut perjuangannya dia belum, tapi kenapa kok dia bisa masuk caleg satu. Itu mungkin uangnya. Di sini aja ada. Kebanyakan masih...apa namanya? Ya masih pribadilah, kepentingan pribadilah. Ya namanya mau jadi saja, mau jadi caleg saja pakai ini pakai itu. Orang terus ada interpretasi cari pengembalian. Biasanya kan gitu. Jadi ini masih...saya kira...menurut hemat saya ya...siapa pun yang pegang tampuk pimpinan untuk saat-saat ini, jadi dari hal itu saja...masih susah negara ini. Belum bisa mendekati adil makmur itu...mendekati saja belum.”

Ungkapan tersebut hendak mengatakan bahwa para caleg lolos bukan karena kualitasnya tetapi lebih karena ‘uang’ nya. Dengan demikian wajar saja jika mereka sudah berhasil terpilih tidak berpikir bagaimana bekerja untuk rakyat tetapi lebih bagaimana mengembalikan uang yang sudah keluar dari koceknya dalam proses pemilihan kemarin. Penilaian semacam ini tampaknya sudah sangat umum dimiliki rakyat baik di desa maupun di kota, sehingga dalam salah satu ungkapan informan dikatakan bahwa sesungguhnya dia tidak begitu percaya dengan caleg yang mana pun.

Dalam sebuah perbincangan dengan seorang informan yang menjadi sopir fungsionaris partai tertentu, terungkap adanya praktek “caleg gadungan”, caleg yang namanya dipajang dan diminta ikut kampanye tetapi sebenarnya diyakini tidak akan dapat suara. Sebagaimana yang terjadi dalam keluarga C. Bentuk pelanggaran tersebut termasuk dalam daftar prediksi praktek beli suara dan manipulasi suara pemilu 2004 yang disampaikan *Indonesian Corruption Watch* 2004, dalam bentuk manipulasi penentuan nomor urut (Djani dkk, 2004). Sayangnya, untuk jenis pelanggaran ini belum ada hukum yang dapat menjeratnya. Sejauh yang disampaikan informan pun sama sekali tidak ada penilaian negatif tentang praktek tersebut.

Pun demikian, dengan kekecewaan dan ketidakpercayaan yang dirasakan warga pedesaan terhadap perilaku elit politik, tidak membuat mereka kemudian mengabaikan hak pilihnya. Warga desa (informan) dan kelompok kelas menengah perkotaan mungkin sama kecewanya dan sama tidakpercayanya dengan caleg yang lolos, partai politik yang ada atau pun anggota legislatif pada umumnya, tetapi kelompok kelas menengah yang berpendidikan tinggi, profesional dan memiliki basis sosial kehidupan perkotaan memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya.

3.5 Kebebasan Berpolitik *versus* “Banpres-Banpres”

Jika di kalangan intelektual perkotaan berakhirnya pemerintahan Orde Baru, yang kemudian disebut sebagai era reformasi, dianggap kemenangan besar dan perubahan yang memberi angin segar bagi kebebasan, keterbukaan serta

PEMILU 2004 DI MATA ORANG-ORANG BIASA

kekuatan rakyat, warga desa justru menganggap ‘reformasi’ lah yang menjadi biang keladi atas kesulitan hidup yang mereka alami pasca Soeharto. Beberapa informan mengungkapkan secara lugas dan tegas tentang kebencianya pada Amin Rais yang menjadi simbol reformasi. Bagi warga desa, reformasi hanya dipahami sebagai perubahan penguasa dari kepemimpinan orde baru (Soeharto) ke kepemimpinan Megawati; atau dari Golkar ke PDI-P. Tampaknya mereka tidak peduli bahwa Amin Rais adalah pemimpin partai yang berbeda, Partai Amanat Nasional.

Dalam logika warga desa kata ‘reformasi’ tidak memiliki makna yang muluk-muluk sebagaimana yang banyak didiskusikan di kalangan akademisi atau pun para elit politik. Makna reformasi sangatlah konkret ukurannya yang dilihat dari semakin mahalnya harga-harga kebutuhan pokok, biaya sekolah, pembangunan yang semakin berkurang dan lain-lain. Logika apa yang terjadi di balik kenaikan harga dan perubahan tersebut misalnya, masalah krisis moneter atau juga perubahan ekonomi dunia sangat jauh jangkaunya dari pemikiran mereka.

Kriteria warga desa untuk menentukan keberhasilan suatu pemerintahan tampaknya memang lebih terkait dengan kriteria yang bersifat konkret misalnya tidak adanya kekacauan/kerusuhan, pembangunan fisik, pekerjaan mudah dicari, harga barang-barang kebutuhan sehari-hari yang stabil, sekolah murah atau bahkan gratis. Kriteria-kriteria ini memang langsung menyentuh kehidupan keseharian mereka. Atau kalau pun dalam istilah abstrak yang beberapa kali muncul adalah ketentraman, buat apa terbuka dan bebas jika dipenuhi aksi gebuk-gebukan, kerusuhan di mana-mana, harga-harga semakin mahal dan lain-lain. Seorang pemilih muda menambahkan, “...dalam arti kata pembangunannya, kewibawaan dia dalam memimpin, kebijaksanaannya ... tidak milih-milih ... nggak terlalu fanatik.”

Dengan kriteria yang bersifat konkret tersebut kemudian dapat dipahami jika sebagian besar dari mereka menilai kepemimpinan Soeharto lebih baik. Menurut penilaian mereka, masa kepemimpinan Soeharto situasi keamanan terjamin (tidak ada kerusuhan, tingkat kriminalitas rendah), harga-harga stabil dan murah, pekerjaan mudah didapat, bantuan presiden sering mereka dapatkan dan lain-lain.

Dalam beberapa ungkapan terlihat pula bahwa mereka lebih menginginkan situasi di masa Orde Baru. Jika para akademisi kota mengungkapkan kekhawatirannya tentang kembalinya kroni-kroni Orde Baru dalam pemilu 2004 jauh sebelum pemilu, maka warga di desa justru berharap kembalinya Orde Baru. Hal ini bukan saja dalam bentuk harapan tetapi di beberapa wilayah di Wanasari memang memperlihatkan Golkar kembali menang.

Meskipun demikian, tidak semua penduduk desa menganggap hal-hal yang konkret, material sebagai satu-satunya kriteria keberhasilan negara. Beberapa dari mereka memberikan apresiasi positif terhadap reformasi. Sunu misalnya seorang anak petani mengatakan,

“Menowo sak menika laki tiyang menika bebas bicara. Nggih dados hakipun menika dilindungi.... jaman rumiyin suara nika dipun impun”

Hal yang sama juga diungkap oleh seorang ibu, “..sekarang ini pegawai negri netral, ya aku nyoblos partai idolaku sendiri.”

Meminjam konsep materialisme-posmaterialisme dari Ingleheart, kebutuhan warga terhadap kehadiran negara sebagian besar masih mengacu pada kebutuhan material. Kajian Ingleheart (dalam De Graaf dan De Greaaf, 1987) memperlihatkan adanya perubahan dari nilai materialisme menuju posmaterialisme yang lebih mementingkan kualitas kehidupan (salah satunya adalah kebebasan berpolitik) di negara barat setelah masyarakat itu memasuki kondisi ekonomi yang mapan. Mungkin sekali bahwa kecenderungan masyarakat untuk menilai pemerintahan dari segi nilai materialisme belaka dideterminasikan oleh penghidupan sehari-hari mereka yang terhitung “pas-pasan” dan ditambah lagi tingkat pendidikan yang rata-rata masih cukup rendah.

3.6 Politik Uang dan Etika Balas Budi

Ketika janji-janji belaka tak lagi dapat menyedot perhatian penduduk, jurus bagi-bagi bantuan masih terasa menggigit. Bantuan bukanlah hal yang tabu. Warga desa tahu persis bahwa hanya pada saat demikian orang-orang kota mau berbagi dengan mereka,

PEMILU 2004 DI MATA ORANG-ORANG BIASA

“Kalau untuk kehidupan masyarakat kita yang ekonaminya lemah kan, dia mendapatkan suntikan dana-dana itu kan otomatiskan dia perlu uang untuk biaya PEMILU tapi karena... aku nyoblos ini, kamu kasih suara sekian nanti ta' kasih uang sekian. Otomatis yang ekanaminya lemah itu kan merasa terbantu dengan adanya kampanye-kampanye ini. Orang caleg dari Golkar itu setiap pos PEMILU itu ada kader 5 orang, dari Golkar itu dikasih 2 juta untuk mengawasi perhitungan pemilihan umum, kan banyak. Tapi kalau yang lain...dari partai lain itu sedikit-sedikit. Tapi kalau misalnya yang sebagai ini yang...sebagai pegawai atau pengawas atau pemimpin, nggak tahu saya...yang yang...kalau dari PDI 10 ribu, dari ini 50 ribu. Ya...otomatis..., terobati ekanaminya.”

Bantuan justru dinilai sangat positif, sangat jauh dari makna sebagai tindakan kejahatan. Seorang informan dalam penelitian ini yang menyebutkan bantuan sebagai pemberian ‘*rasa*’ yang harus dibalas dengan ‘*rasa*’ pula. Bagi orang Jawa di desa, istilah ‘*rasa*’ sering digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang menyentuh kedalaman hati nurani, yang dalam hal ini berkaitan dengan persoalan balas budi.

“Kowe sesuk nek wong wis dinehi rasa ki ya malesa rasa. Tegese niki mboten seko partai. Senajan... nek paham kula, senajan seko PDI Perjuangan, nik maksute rak... jagonya DPRD tek niku loh mas. Dadi sesuk... aku ki arak... njago ning DPR apa MPR apa DPD, kuwi sing ngenehi rasa nyang kowe kawujud semen kuwi. Sesuk kowe miliho aku. Ki men sagoh. Yoh, gambarmu apa ngoten. Delok o ngisor PDI Perjuangan ana tulisane yo kuwi gambarku nyoblos o kana kuwi, ngoten. Saking Golkar, nggih angsal kalih dasa. Nggeh mpun digunaake niku. Niku wong riki mpun seneng nggeh mas, kulo barang niku mpun klebu melu seneng, tegese ee nek ngana yo... bocah-bocah kuwi... do nggateake karo peparinge uwong sing isa maringi. Nyatane nggeh kesagohan, nggeh kesanggupan ning awas ngati-atি lo cah sesuk nek ora kok... tetepke kesagohanmu utawa janjimu kuwi. Muga-muga ampun nganti lali hiyoh.”

Informan lain menolak pemberian bantuan dengan dasar etika yang sama,

“Ndereknya itu...tampa tali ikatan, kalau ada tali ikatan entah...itukan lebih berat, harus dengan lahir batin. Nguruhi sama calegnya lebih berat ndak patut sama yang kuasa, ingkar janji jadi lebih berat kan lebih baik ndak nerima apa-apa kan bebas.”

Ia tak mau terikat. Mungkin karena uang juga bukan persoalan baginya, seorang wiraswastawan yang terhitung sukses di desanya. Hal yang sama diungkap seorang ibu yang memiliki pendidikan tinggi dan memiliki sejarah keluarga yang ditekan selama Orde baru.

“Jadi aku memang nggak mau itu, harus jujur gitu. Tapi setelah sekarang ini pegawai negeri netral, ya aku nyoblos partai idolaku sendiri, gitu. Aku nggak mudah terpengaruh oleh kampanye lain gitu. Pernah lho ada orang datang. Bahkan itu orang...seorang haji ulama terkenal dan itu tilas kepala dinas kepala sekolah ya, karena saya tuh keluaran D2 UNY kan belum sempat meneruskan ke S1. Itu datang ke sini mempengaruhi saya supaya saya itu mau nyoblos partainya dia sebagai caleg kalau mau nyoblos mau disekolahkan S1, itu. *Tapi Ndak* mau, saya *ndak* mau. Pokoknya saya apa...tidak milih untuk diberikan sesuatu terus tertarik itu saya *ndak*, betul-betul *ndak* saya, *ndak* mau saya. Itu kan bukan milik saya, mungkin dibutuhkan orang yang lain...*mangga* gitu. Aku nggak pernah...orang mau disekolahkan S1 aja saya nggak ini kok.

Melihat modus dan bentuk politik uang yang terbuka ini bisa dikatakan wilayah yang paling rawan politik uang adalah masyarakat miskin yang sering disebut sebagai pemilih irasional (Kompas, 2 Juli 2004). Jika menurut para ilmuan politik, warga desa ini digolongkan sebagai pemilih irasional, justru dalam logika warga desa sendiri kecenderungan memilih berdasarkan adanya bantuan atau tidak itulah tindakan yang paling rasional yang pernah dilakukannya. Bagaimana tidak bisa dikatakan rasional jika bantuan tersebut dapat membuat kehidupannya kembali berdenyut. Jika kedua logika ini dibenturkan maka yang pusing dan bingung tentulah kedua belah pihak, tidak akan pernah nyambung. Logika orang desa mungkin akan mengatakan begini;

PEMILU 2004 DI MATA ORANG-ORANG BIASA

“Kula saniki-niki angel’e, nggih teng ngriku niku. Ngangge politik niku ta saniki niku, ngangge politik dadi tebakane ki ya mung rung karuan. Ha lha becike ki sing endi ki, ya rungAngel’e nggih teng ngriku. Lha ne’ sing kaya kula niku nggih malah olehe ngrasak’ke, awut-awutan. Endi ta sing apk?”

(“Saya sekarang ini susahnya di situ itu. Tentang politik itu to yang sekarang itu, tentang politik itu tebakannya ya hanya tidak karuan. Ha lha yang baik yang mana, ya belum tau... Susahnya ya di situ itu. Lha kalau orang seperti saya malah merasakannya “awut-awutan”. Mana to yang baik itu?”)

3.7 Alam Pikiran Feodal

Meskipun telah cukup lama republik ini berdiri, pemahaman masyarakat desa tentang sistem hubungan kekuasaan sebagian besar masih terbalut oleh alam pikiran feodal kerajaan yang tersusun secara hirarkis dan penonjolan person dibanding sistem. Bagi mereka kekuasaan tersusun secara hirarkis: pusat lebih menonjol ketimbang daerah. Seorang informan menyatakan,

“Tapi yang pusat itu lho jangan sampai salah....Intinya kan pusat. Lembar satu dua itu nyoblos apa saja nggak masalah.”

Pernyataan itu menganggap pilihan pada tingkat propinsi maupun kabupaten tidak ada artinya, karena kekuasaan berlangsung di pusat dan merembes ke daerah. Mereka tidak menyadari bahwa sebagian besar pengaturan sosial yang akan menimpa mereka bergantung pada kebijaksanaan di tingkat daerah.

Model hirarkis itu juga tampak pada pemikiran bahwa lembaga DPR/DPRD merupakan hirarki di bawah lembaga pemerintahan. Seorang informan yang lebih memiliki akses terhadap informasi-informasi politik (caleg No 4 dari partai tertentu) menyatakan tentang caleg no 1 yang sekaligus adalah ketua cabang partai,

“... Pak Ibnu punya cita-citra di DPR paling lama satu tahun selanjutnya akan dilemparkan ke nomor bawahnya yang berprestasi. Dan Pak Ibnu akan berangkat naik lagi mencalonkan bupati yang cita-cita utamanya itu.”

Penonjolan person dibanding sistem atau organisasi tampak pada pernyataan beberapa informan. Bagi mereka semua partai itu baik. Kalau tidak baik mana mungkin disetujui untuk menjadi peserta pemilu. Yang tidak mereka sukai adalah person-personnya. "Pada dasarnya semua partai itu baik cuma figur orang-orangnya yang tidak kita suka...." kata si caleg No 4. Seorang birokrat desa menambahkan, "Pada dasarnya semua parti itu baik, kalau tidak baik ya tidak jadi peserta pemilu tho/nah yang jelek itu watak individunya. Ya orang-orang yang ada di dalam partai itu....". Cara berpikir semacam ini membuat pembacaan tentang ideologi partai maupun program-programnya tidak berarti.

5.8 Kecenderungan Pilihan

Dengan keterbatasan informasi yang mereka miliki tentang cara kerja sistem demokrasi, hak-hak politik, konsekuensi dari pilihan, maupun informasi tentang apa yang ditawarkan oleh parpol peserta pemilu, warga desa dengan mantap berangkat menuju bilik suara. Memilih adalah kewajiban, meskipun tidak tahu mana yang hendak dipilih. Sebagian besar memperoleh informasi tentang parpol hanya dari kampanye jalanan. Keterbatasan itu cenderung akan mengarahkan mereka pada pilihan terhadap partai-partai besar yang lebih sering tampak di ruang kesadaran mereka. Partai yang mereka hafal. Seorang petani mengatakan, "Kudu sing dimenangke niku, nggih pangapunten masalahe, ning ngertine nggih mung da niku." Istrinya menambahkan, "Tamate nggih mung Golkar." Model ini menguntungkan partai yang lama berkuasa.

Pada kelompok yang lebih "maju" ruang pilihan lebih melebar, tidak hanya Golkar, tetapi juga partai-partai besar lain. Misalnya seorang wiraswastawan desa mengatakan, "Ya kuning juga pernah, ya cuma merah kuning itu. Ya akhir-akhir ini merah terus." Pada kelompok pemilih pemula pun preferensi juga terbatas pada partai – partai besar, "..yang satu Golkar...PAN ... PKB, yang satu PDIP, itu kan partai-partai besar."

Selain familiaritas, pilihan sebagian juga ditentukan oleh hubungan perkonoaan dan kekeluargaan. Informan-informan yang memiliki saudara atau teman yang menjadi caleg akan

cenderung memilihnya. "Keluargaku itu ya, karena calegnya dari PDIP itu kan yo wes kowe nyoblos PDIP," kata seorang informan yang masih tergolong remaja (mahasiswa). Pilihan bukan lagi pilihan individu, tetapi perkerabatan.

Model ketiga adalah pilihan berdasar pengalaman masa lalu. Seorang ibu yang mengaku pernah dianak tirikan di masa orde baru, karena salah satu anggota keluarganya terkait dengan partai terlarang mengatakan, "...kalau milih ini kita udah menjadi korban dari ini...Tapi kalu bisa mbok ya milih ini...." Selain ketiga hal tersebut di atas: familiaritas, kekerabatan-perkoncoan dan ikatan masa lalu, pilihan juga ditentukan oleh kesan-kesan baik yang ditampakkan oleh partai-partai tertentu semasa kampanye, misalnya dengan pemberian bantuan. Seorang pemilih muda berujar, "Ya kalau partainya tuh yang bisa bantu kita mbak .. kan desaku bangun masjid, nah terus calegnya ...bantuin kasih dana untuk materialnya (terus kamu nyoblosnya berdasar itu ya...?) iya mbak kan mereka udah baek."

Keempat kriteria pilihan itu menjadi sandaran para pemilih di wilayah pedesaan. Kemiskinan informasi membuat ruang-ruang pilihan mereka menjadi lebih sempit. Di samping bahwa partai-partai kurang tegas menunjukkan arah ideologisnya. Mereka tak menyatakan hendak dibawa ke mana republik ini.

3.9 Hubungan antara Rakyat dan Negara

Di sisi lain para informan mengatakan bahwa pemilu dianggap sebagai 'barang negara', atau *negara duwe ewuh sing kawujud pemilu*, yang artinya pemilu menjadi agenda penting negara. Namun jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, mereka mengungkapkan bahwa pemilu tidak menyentuh kepentingannya secara langsung. Berbeda kalau pemilihan lurah, yang menurut penuturan salah satu informan sebagai 'bapak' warga tentu pemilihan lurah dirasakan sebagai kepentingan orang desa. Sebagaimana yang terungkap berikut ini:

"Pemilu nggih mboten pemilu nggih ngeten niki...sami kemawon.

Pangapunten nek pilihan lurah sesuk. Nek pilihan lurah kan nggih deso tho...lha nek niki namung di enggeh negara...nek

tiyang ndeso mboten ngrasakke banget. Lha nek lurah kan dados bapakke...Dadose mileh niku yo meng waton mileh wong yo mboten reti....sing kepilih nggih mboten retos tiyang mriki...lha nek sing pegawe niku...paling nggih angsal napa...lha nek namung tiyang dusun niku napa...tinimbang mboten tumut nyoblos...niki sing dadi lha nggih namung manut..."

Konsep negara dianggap sebagai konsep yang tak terjangkau, begitu berjarak dengan wong cilik. Atau dapat dikatakan bahwa kekuasaan negara tidak mampu menjangkau sampai warga pedesaan (atau orang cilik). Kekuasaan negara hanya mampu menjangkau wong cilik setiap lima tahun sekali, yakni saat wong cilik menggunakan hak pilihnya. Namun selebihnya, kebijakan yang dikeluarkan negara tidak mampu menyentuh kepentingan wong cilik, termasuk pula tentang hasil pemilu. Sebagian besar informan mengatakan bahwa hasil pemilu tidak memiliki relevansi apa-apa terhadap kehidupan mereka:

"Nggih, pokok'e ya, mbok enek kepiye corek bentuke ya kur ngene iki he..he..he..Mboten enten sing berubah. Wong arepa sing didadekne sapa-sapa ya...kur pada bae."

Hasil pemilu tidak mampu menyentuh kepentingan warga pedesaan, oleh karena itu bagi mereka yang penting sudah menggunakan hak pilihnya. Jika keterlibatan dalam pemilu sebagai pemilih tidak diwajibkan kemungkinan besar akan banyak warga yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya.

"Melihat hasil pemilu, wah gak sempet mbak...wong aku sibuk masak dirumah.Ya gimana ya mbak...aku manut aja. Yang penting udah nyoblos tho? Wis lega...(tertawa lagi).

"Udah nyoblos Nggih lega mbak...pun nyoblos" Mboten patek pengen ngertos hasile mbak nek ngonten niku...pun ndherek mawon mbak. *Mboten mbak...wong niku rak 'barang' negara. Mengko nggak malah salah.*"

Istilah yang dipakai informan untuk mengungkapkan negara (yang seringkali disamakan dengan pemerintah) antara lain: *wong dhuwur, sing ngarep, sing enjeh ngomong*, yang duduk

PEMILU 2004 DI MATA ORANG-ORANG BIASA

di atas, pemerintahan di atas, orang terkemuka, *mriko mawon*, yang di depan. Sementara mereka menyebut diri mereka dengan istilah-istilah berikut ini *wong goblok*, *wong ndeso*, wong tani, bocah cilik, wong cilik, rakyat kecil, korban politik, dan *cethol* (ikan yang sangat kecil dan tak berdaya). Dari penggunaan istilah untuk menyebut negara dan menyebut dirinya sendiri, tampaklah jarak psikologis itu demikian besar. Hubungan antar keduanya dapat ditangkap dari kata sifat yang dilekatkan untuk masing-masing pihak. Kata sifat yang dilekatkan oleh mereka untuk diri mereka sendiri antara lain:

“ora dong, ora ngerti apa-apa, mboten ngerti, mboten ajeng pripun-pripun, mboten njangko, mboten saged omongan; “mung manut, mung ngrungokke, ora protes, meneng, midangetake, ngrasakake, njinggleng, menyer-menyer, anggere didhwuhi, dibeluk semaur, diprintah moro, mpun, mboten mbangkang, nolak, nggih sendika, nglampahi, teko, ngrungokke, nggatekake; dan

“mboten diurusi, diwajibke, melu ngrasakke, ora golek masalah, ojo gawe masalah, ojo kokehan rembug, wedi sanksine, keteluh, berjarak dengan wong dhuwur.”

Sedangkan kata sifat yang dilekatkan untuk pemerintah antara lain:

“duwe tembung, tidak paham rakyat, tidak bisa diatur, *bambung*, ingkar janji, diam, duduk enak di kursi empuk.”

Pemilihan kata sifat tersebut mengungkapkan bahwa rakyat (wong cilik) selalu memposisikan diri sebagai pihak yang lebih banyak mencoba mengerti kemauan negara, sementara negara digambarkan sebagai pihak yang tidak mengerti kemauan rakyatnya. Dengan logika ini yang terjadi kemudian memang bukan pemerintah yang akan melayani rakyat tetapi justru rakyatlah yang selalu melayani pemerintahnya. Sebagaimana terungkap dari salah satu informan yang masih menginginkan kepemimpinan Megawati dengan alasan agar ‘terbiasa dulu’ sehingga mengerti kemauannya baru diganti:

“Ning mugi-mugi nggeh sageto Bu Mega mawon disik. Sing kulo maksud niku, nek Bu Mega kuwi coro cilike, leh dadi ibune wis 4 tahun nggeh? Kuwi lagi arep kulino. Men soyo kulino ki

genepi 5 tahun engkas, Bu Mega niku. Lah sesuk nek wis kulino, uwis, apal karo kersane bu Mega, mang ganti.”

Dalam hal ini rakyatlah yang justru berusaha mengerti pimpinannya. Bagi warga desa seorang pemimpin adalah sosok yang sangat dihormati, sebagai *pepundhen* yang artinya harus dijunjung tinggi. Bahkan hal-hal yang berkaitan dengan pimpinannya akan dianggap sakral oleh warga desa yang lugu ini. Ada satu informan lagi yang mengungkapkan bahwa menjual gambar presidennya saja bagi dia sama saja menjual presidennya.

Sedemikian sakralnya hal-hal yang berkaitan dengan negara sampai-sampai simbolnya saja dianggap sebagai sosok yang hidup (dalam hal ini foto presiden). Sementara gambar-gambar presiden yang disimpan bukan saja presiden yang sedang menjabat tetapi termasuk pula presiden-presiden terdahulu. Dalam UU memang disebutkan bahwa warga negara harus menghormati simbol-simbol negara seperti bendera, foto presiden yang sedang menjabat dan lain-lain. Namun, dalam UU tersebut tidak menganggap foto mantan presiden sebagai simbol negara. Jika mencermati kecenderungan ini maka tampaklah bahwa warga desa menganggap presiden dan mantan presiden sebagai *pepundhen* yang selalu dihormati. Budaya patronase masih sangat kental dalam kultur warga pedesaan. Di Indonesia, kelompok ini justru lebih banyak daripada kelompok terdidik perkotaan. Jumlah pemilih di pedesaan cukup besar, hampir 60 persen di setiap daerah, yang sering disebut sebagai pemilih tradisional (Kompas, 9 Februari 2004). Dalam konsep demokrasi dipahami posisi egaliter antar yang dipimpin dan yang memimpin, sementara dalam kultur paternalistik (patronase) konsep egaliter jelas-jelas tidak ada.

Bahkan ada satu informan yang jelas-jelas menganalogikan pemerintahan negara sebagai kepala rumah tangga, artinya kepala pemerintahan adalah ‘bapak’. Dalam logikanya jelas tampak ia memasukkan ide negara sebagai keluarga. Dalam kosmologi Jawa, keluarga itu melebihi dunia moral yang diberi ciri saling memiliki kewajiban. Pertama-tama – seperti diketahui banyak orang – kewajiban ini tidak sama antar individu dan inilah yang memberikan landasan moral tentang kenyataan

PEMILU 2004 DI MATA ORANG-ORANG BIASA

adanya hirarki dan kewajiban seseorang untuk membimbing dan memimpin yang lain. Orang yang lebih tua, guru, dan khususnya orang tua adalah pribadi yang sangat dihormati, menjadi *pepundhen*, suatu kedudukan yang layak bagi mereka karena perhatian, perlindungan, dan ajarannya. Sebagai pengatur dan wakil kehidupan, orang tua memegang kedudukan setengah-religius yang dihiasi oleh ide bahwa menentang mereka itu merupakan dosa (*duraka*, juga pemberontak) dan akan dihukum, di dalam hidupnya, oleh sanksi gaib yang tidak terelakkan (*kuwalat*).

Dengan mencermati istilah-istilah yang digunakan oleh para informan dalam menyebut pemerintah dan menyebut dirinya sendiri dapat kita tangkap setidaknya ada tiga (3) jenis karakter pemilih di pedesaan. Karakter *pertama*, mengungkapkan sebagai pihak yang tidak mengerti apa-apa dengan menyebut dirinya sebagai *wong goblok*, *wong ndeso*, dan *wong tani*. Dengan karakter ini kemungkinan sikap yang muncul adalah:

“ora dong, ora ngerti apa-apa, mboten ngerti, mboten ajeng pripun-pripun, mboten njangko, mboten saged omongan”

Dengan sikap ini maka wajar jika kemudian berkenaan dengan urusan negara, dalam hal ini hasil pemilu para informan mengatakan *moso bodho*, *mboten urusan*, terserah, urusan masing-masing. Penggunaan kata-kata tersebut bukan berarti mereka bersikap apatis tapi lebih mengekspresikan kesederhanaan dalam berpikir dan kepasrahan wong cilik kepada negara.

Karakter *kedua*, menggambarkan rakyat sebagai pihak yang siap melaksanakan apa pun yang diperintahkan oleh negara. Istilah-istilah ini terwakili dalam istilah, bocah cilik, wong cilik, dan rakyat kecil. Padanan kata kerja yang kemudian muncul seiring dengan istilah tersebut adalah bisa diprintah, diarahke, dan bisa diatur. Berkenaan dengan pemilu karakter ini mereka cenderung:

“mung manut, mung ngrungokke, ora protes, meneng, midangetake, ngrasakake, njinggleng, menyer-menyer, anggere didhawuhi, dibeluk semaur, diprintah moro, mpun, mboten mbangkang, nolak, nggih sendika, nglampahi, teko”

Karakter kedua ini menggambarkan kesungguhan dan keseriusan wong cilik dalam mendukung dan terlibat dalam kepentingan negara (dalam hal ini pemilu) meskipun sesungguhnya mereka tidak cukup memahami dan pemilu tidak cukup menyentuh kepentingannya.

Karakter *ketiga*, menggambarkan warga sebagai pihak yang tidak berdaya menghadapi kekuatan negara. Kelompok ini menyebut diri sebagai korban politik, *cethol* (ikan kecil), dan *wong mung diphintah*. Kata kerja yang biasa dilekatkan pada diri mereka, menurut pendapat mereka sendiri adalah *mboten diurus* dan *diwajibke*. Sikap yang muncul kemudian adalah:

“melu ngrasakke, ora golek masalah, ojo gawe masalah, ojo kokehan rembug, wedi sanksine, *keteluh* (=kuwalat), berjarak dengan wong dhuwur

Karakter ini menggambarkan betapa takutnya wong cilik menghadapi kekuasaan negara. Jika mereka sampai berani kepada yang berkuasa pasti akan menerima akibat yang tidak enak. Dengan kecenderungan ini, warga desa selalu bersikap hati-hati menghadapi negara.

Dengan gambaran karakter warga pedesaan yang sederhana dalam berpikir, pasrah kepada negara, siap melaksanakan apapun yang diperintahkan negara dengan kesungguhan dan keseriusan serta sikapnya yang selalu berhati-hati, bukan hal sulit bagi negara untuk melibatkan warga pedesaan dalam agenda-agenda negara. Warga pedesaan dengan segala keterbatasannya sudah mencoba untuk memahami kemauan pemimpinnya, bahkan sekaligus sudah diwujud-kan dalam tindakan nyata berpartisipasi menggunakan hak pilih. Hanya saja tampaknya sosialisasi kebijakan negara selama ini hanya terjangkau bagi kelompok terdidik perkotaan dan tidak mampu menjangkau warga pedesaan. Warga pedesaan tidak mendapatkan pendidikan politik yang cukup memadai. Akibatnya, keterlibatan warga pedesaan seringkali tidak dengan pemahaman yang cukup tentang apa yang dilakukannya. Hal ini tampak misalnya dalam keterlibatan mereka di dalam pemilu 2004 sebagai pemilih, yang dengan mudah kemudian pilihan-pilihannya dipengaruhi misalnya oleh praktik *money politic* dengan wujud bantuan uang maupun material bangunan.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini menghasilkan beberapa poin utama, antara lain: **Pertama**, pemilu dimaknai oleh informan, orang-orang biasa (rakyat desa), sekedar sebagai 'hajat' negara yang hanya mampir dalam kehidupan rakyat desa setiap lima (5) tahun sekali, yakni saat mereka menggunakan hak pilihnya. Sebagaimana sebuah penyelenggaraan 'hajat' di kampung, keterlibatan rakyat biasa hanya akan terlihat sesaat sebelum dan pada saat hari H pemilihan, selebihnya mereka akan pulang dan kembali disibukkan dengan kehidupan sehari-hari. Kampanye pemilu pun dinilai sebagai sekedar karnavalnya anak muda, adanya tontonan gratis, media luapan emosi dan hura-hura. Khusus tentang hasil pemilu, sebagian besar informan mengatakan bahwa hasil pemilu tidak memiliki relevansi apa-apa terhadap kehidupan mereka, kehidupan tidak berubah setelah pemilu.

Kedua, hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa kebutuhan warga terhadap kehadiran negara sebagian besar masih mengacu pada kebutuhan material. Kecenderungan masyarakat untuk menilai pemerintahan dari segi nilai materialisme belaka dideterminasi-kan oleh penghidupan sehari-hari mereka yang terhitung "pas-pasan" dan ditambah lagi tingkat pendidikan yang rata-rata masih cukup rendah. Oleh karena itu, kecenderungan pilihan yang muncul kemudian berdasarkan faktor familiaritas, hubungan perkoncoan dan kekeluarga-an, pengalaman masa lalu dan kesan-kesan baik yang ditampilkan partai (misalnya pemberian bantuan). Pemahaman masyarakat desa tentang sistem hubungan kekuasaan, sebagian besar masih terbalut oleh alam pikiran feodal kerajaan yang tersusun secara hirarkis dan penonjolan person dibanding sistem. Bagi mereka kekuasaan tersusun secara hirarkis: pusat lebih menonjol ketimbang daerah, pilihan pada tingkat propinsi maupun kabupaten tidak ada artinya, karena kekuasaan berlangsung di pusat dan merembes ke daerah. Rakyat desa tidak menyadari bahwa sebagian besar pengaturan sosial yang akan menimpa mereka bergantung pada kebijaksanaan di tingkat daerah. Cara berpikir semacam ini membuat pembacaan tentang ideologi partai maupun program-programnya tidak berarti.

Ketiga, kekuasaan negara tidak mampu menjangkau kehidupan rakyat desa, kebijakan yang dikeluarkan negara seringkali tidak mampu menyentuh kepentingan rakyat desa. Bagi rakyat desa, selama ini negara hadir sebagai sosok yang formal, struktural, impersonal dan abstrak. Sementara rakyat desa akan mampu merasakan kehadiran negara dalam wujud-wujud material, konkret dan personal misalnya dalam bentuk bantuan material atau pun pertemuan-pertemuan secara langsung.

Negara atau partai politik yang secara khusus mendapat tugas penyadaran politik bagi masyarakat pemilih harus mampu melakukan sosialisasi dengan media yang lebih melibatkan partisipasi langsung dari masyarakat pemilih (bersifat personal), misalnya dengan pertemuan-pertemuan langsung di tingkat desa, bukan melalui media seperti TV, koran atau alat teknologi lainnya. Sosialisasi melalui media massa (cetak atau pun elektronik) tidak cukup efektif bagi rakyat di pedesaan. Bagi rakyat pedesaan, negara harus mampu hadir dalam wujud-wujud yang konkret.

DAFTAR PUSTAKA

- Abt, L. E. & Bellak, L. 1959. *Projective Psychology: Clinical Approaches to the Total Personality*, New York: Grove Press Edition.
- Adhisumarta, FX Sriyadi. 2003. "Kabupaten Gunung Kidul", Kompas, Jum'at, 07 Maret.
- Anderson, B. 1999. *Komunitas-Komunitas Imajiner: Renungan Tentang Asal Usul dan Penyebaran Nasionalisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan INSIST
- De Graaf, N and De Graaf, P. 1987. *Family Background, Postmaterialism and Life Style*. Nuremberg Meeting of The ISA Research Committee on Sosial Stratification, April 1987.
- ICW (Indonesian Corruption Watch). 2004. "*Menangkal Bahaya Laten Korupsi Pemilu*". *Position Paper*. Luky Djani, Rahmi Yunita, Iz Fahmy Badoh, dan Emerson Yuntho.
- Freud, S. .1920. *A General Introduction to Psychoanalysis*, New York: Boni & Liveright.
- Hobsbawm, E.J. 1992. *Nasionalisme Menjelang Abad XXI*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Huen, P.L.P, Morrison J.H., & Guan K.C. 2000. *Sejarah Lisan di Asia Tenggara: Teori dan Metode*, Yogyakarta: LP3ES
- Herusansana, Winarto. 2004. "Politisi Bermasalah, Masalahnya Siapa?", Kompas, Senin, 09 Februari.
- Lombard, D. 1996. *Nusa Jawa Silang Budaya*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nasikun. 2004. "Golput Siapa Takut?" Kompas, Selasa, 06 Januari.
- Masduki, Teten. 2004. "Politik Uang dan Pemenangan Pemilu", Kompas, 2 Juli
- Prihadiyoko, Imam. 2004. "Bangsa yang Tak Pernah Memilih Sendiri Pemimpinnya: Pemilihan Presiden 2004", Kompas, 7 Mei.
- Shiraishi, T. 1997. *Jaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.